

# FENOMENA NON FARM



*Nazaruddin Malik*

**There is a tendency that the area of land for agriculture gets narrower and narrower and the rate of rural population growth increases the number of unemployment in countries.**

**Meanwhile the development strategies applied in the sector of agriculture seems incapable of giving opportunity for the growth of new job alternatives in the sector of non—agriculture. Therefore, what is needed at this time is that the strategy of agricultural sector considering the interrelatedness between the sector of agriculture and non—agriculture.**

Study yang dilakukan di 57 negara-negara sedang berkembang menunjukkan bahwa pemilikan pertanian kini semakin semakin sempit. Sèparo dari jumlah petani yang tidak memiliki dari satu hektare. Bahkan dinegara-negara tertentu seperti Nepal, India dan Bangladesh terdapat penduduk yang tidak memiliki lahan secara tetap (tidak kurang dari 30 juta orang) sehingga mereka terpaksa menggunakan hutan untuk melakukan proses pertanian. Ini menyebabkan semakin luasnya kerusakan hutan. (Jawa pos, Minggu 31 Mei 1992).

Ilustrasi diatas menggambarkan betapa masalah jumlah dan laju pertumbuhan penduduk semakin menuntut perhatian serius, terutama bila di kaitkan dengan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Karena itu, Strategi pembangunan yang di kembangkan selalu diupayakan untuk menyeimbangkan faktor ketiga tersebut, terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan, yang menonjol dalam bentuk ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota dan dapat di temukan di banyak negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia.

Di Indonesia laju pertumbuhan penduduk memang cenderung menurun. Jika pada kurun waktu 1971-1980 pertumbuhannya pertahun terbesar 2,32 persen, maka periode berikutnya 1980-1990 menurun menjadi 1,98 persen pertahun. Namun secara absolut jumlahnya relatif cukup besar, sekitar 147. 194. 000 jiwa (BPS, 1990) dan sebagian besar diantaranya, sekitar 74 persen tinggal dipedesaan (BPS, 1987). Kondisi ini diikuti oleh meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja itu sendiri. Pada periode 1980- 1985 tenaga kerja tumbuh sebesar 2,9 persen per tahun, yaitu dari 104,4 juta menjadi 120,4 juta. Tingkat pertumbuhan tenaga kerja ini lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk dan sebagian besar berada di pedesaan. Laju pertumbuhan tenaga kerja lebih tinggi di daerah perkotaan, sebesar 6,2 persen pertahun, dibandingkan di pedesaan hanya 1,9 persen pertahun. Hal ini mungkin

disebabkan adanya urbanisasi (perluasan kota) atau meningkatnya arus migrasi desa kota.

Demikian pula halnya dengan jumlah angkatan kerja, antara periode 1980-1985 tumbuh sebesar 3,9 persen per tahun, dimana bagian terbesarnya juga berada di pedesaan sebesar 42,4 juta, meningkat menjadi 49,6 juta pada tahun 1985, namun persentasenya menurun dari 81 persen menjadi 78 persen (BPS, 1987).

Perkembangan ketenagakerjaan tersebut secara langsung mengakibatkan semakin sempitnya lahan pertanian, tidak adanya sektor alternatif diluar sektor pertanian tentu akan mengakibatkan terciptanya pengangguran di desa dan mendorong arus migrasi desa kota, dan jika tidak tertampung angka pengangguran di kota. Namun patut diperhatikan bahwa tingkat pengangguran terbuka di pedesaan lebih rendah dari perkotaan. Menurut Effendi (1992) yang mengutip Turnham (1971:3), hal ini berkaitan dengan perbedaan struktur peluang kerja. Di pedesaan, usaha di sektor pertanian, usaha rumah tangga lebih berperan dari pada usaha-usaha dan kegiatan non pertanian. Mereka yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan dapat saja bekerja sementara dengan membantu usaha keluarga dicatat sebagai pekerja meskipun tidak di bayar.

Sampai saat ini juga belum diketahui bagaimana distribusi kesempatan kerja di pedesaan atas dasar sumbangan setiap kegiatan-kegiatan terhadap pendapatan rumah tangga menurut sektor ini. Padahal upaya perumusan kebijakan perluasan kesempatan kerja oleh pemerintah sangat memerlukan pengetahuan tentang sumber-sumber pendapatan di pedesaan. Menurut Manning (1984), penciptaan kesempatan kerja itu sendiri bukanlah merupakan tujuan akhir sesuatu kebijakan pembangunan ekonomi, melainkan membuka lapangan yang lebih produktif dan peningkatan pendapatan masyarakat desa. sebagai perbandingan, menurut Oshima, Kasa, Ho dan Park (1986), salah satu kunci keberhasilan pembangunan pedesaan di

negara-negara Asia Timur seperti Korea, Taiwan dan Jepang adalah hasil dari perluasan kesempatan kerja di luar sektor pertanian di pedesaan (Elfindri dan Yusrizal Yulius, 1991)

Sampai saat ini, strategi pembangunan yang memberi perhatian pada perkembangan sektor pertanian sebagai bagian dari usaha menghapus kemiskinan di pedesaan telah berhasil meningkatkan produksi pertanian terutama pangan melalui swasembada beras dan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan. Namun nampaknya, revolusi hijau melalui modernisasi dan mekanisasi teknologi pertanian belum cukup menampakkan peran penting dalam penciptaan kesempatan kerja baru di pedesaan khususnya perkembangan sektor non farm sebagai alternatif bagi keterbatasan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja. Mengutip pendapat Khada (1982), perluasan peluang kerja bukan pertanian perlu mendapat perhatian dalam strategi perluasan peluang kerja pedesaan. Setidaknya ada tiga fungsi pokok sektor non farm dalam pengembangan pedesaan. *Pertama*, kemampuannya untuk merangsang terciptanya peluang kerja baru tanpa harus didukung oleh permodalan yang besar dan kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja. *Kedua*, sebagai sumber pendapatan penting bagi rumah tangga pedesaan yang tidak memiliki lahan dan ketiga, peluang kerja pertanian memiliki efek keterkaitan dengan pengembangan pertanian dan industri disamping mengurangi arus migrasi desa kota (Effendi at all, 1990).

Berikut akan coba ditelusuri bagaimana prospek sektor non farm sebagai alternatif perluasan kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi pedesaan. Pandangan teoritis yang dikemukakan diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap pentingnya usaha untuk pengembangan sektor ini di masa datang dalam

usaha meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan.

### Pengertian dan Karakteristik Non Farm

Tipisnya perbedaan antara peluang kerja luar pertanian (*off farm employment*) dengan peluang kerja bukan pertanian (*non farm employment*), menyebabkan terjadinya kesulitan dalam menentukan batasan yang jelas tentang pengertian dan karakteristik sesungguhnya dari sektor non farm. Seringnya kedua istilah ini dipakai secara bersamaan menyebabkan pula kesulitan untuk membedakannya (Effendi at all, 1990).

Suatu perbedaan mendasar dikemukakan oleh White (1986:iii), menyebutkan bahwa aktivitas non-farm pedesaan (*rural non farm activity = RNFA*), mengacu pada aktivitas non pertanian yang menghasilkan pendapatan bari rumah tangga dan anggota rumah tangga pedesaan, tanpa memperhatikan apakah rumah tangga itu memiliki usaha tani atau tidak. Jadi RNFA tidak termasuk pekerjaan pertanian pada usaha tani atau perkebunan lain (tenaga kerja upahan pertanian), yang kadang-kadang termasuk dalam istilah pekerjaan *off farm*; akan tetapi termasuk aktivitas lain yang berkaitan dengan produksi pertanian itu sendiri, seperti produksi dan suplai input pertanian, transport, dan prosesing hasil dan hasil sampingan pertanian. Juga termasuk (dalam hal ini tidak ada konsensus dalam literature terakhir) aktivitas yang menghasilkan pendapatan di luar desa dari anggota rumah tangga pedesaan yang bermigrasi secara musiman atau sirkuler (non permanen) ke daerah perkotaan.

Ho (1986) yang membagi pekerjaan pertanian menjadi dua kelompok (*off farm dan non farm*), mengartikan pekerja non farm adalah rumah tangga atau perorangan yang lapangan usaha pokok mereka adalah di luar sektor per-

### Perluasan peluang kerja bukan pertanian perlu mendapat perhatian dalam strategi perluasan peluang kerja pedesaan.

tanian pedesaan. Sedangkan pekerja off farm, adalah rumah tangga yang memperoleh sumber pendapatan berasal dari aktivitas yang juga ada kaitannya dengan usaha pertanian seperti peternakan dan lain-lain (Elfindri dan Yusrizal Yulius, 1991). Berdasarkan karakteristik pekerja, maka kegiatan non farm dapat dilakukan oleh rumah tangga tani atau bukan, sedangkan pekerjaan luar pertanian dilakukan oleh rumah tangga tani (Mukhopadhyay dan Lim, 1985;5).

Jadi, peluang kerja bukan pertanian (*rural non farm employment*) mencakup semua kegiatan ekonomi seperti industri, industri rumah tangga, industri pengolah hasil pertanian, bengkel reparasi, angkutan perdagangan, dan semua kegiatan yang dilakukan untuk tujuan komersial diluar kegiatan pertanian yang dilakuakn di daerah. Semua kegiatan ini dilakukan oleh rumah tangga tani dan bukan rumah tangga tani yang sementara dan permanen sifatnya (Effndi at all, 1990).

### Strategi Pembangunan Pertanian

Usaha perluasan kesempatan kerja amat terkait dengan strategi pembangunan yang dilaksanakan. Walaupun didasarkan anggapan adanya kelemahan di sktor pertanian, pemelihan strategi industrilisasi dengan sasaran pertumbuhan dan pemerataan dilakukan tanpa mengabaikan arti penting sektor pertanian sebagai landasan dan prasyarat dari proses industrilisasi itu sendiri. Faisal Kasryno (1984) yang mengutip Jhonson dan Clark (1982), mengungkapkan bahwa pemerataan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan dapat dicapai bersamaan dengan menerapkan strategi pengembangan produksi yang didasarkan atas perluasan kesempatan kerja. Mellor (1975) menyebut strategi pertumbuhan pedesaan semacam ini sebagai strategi pembangunan ekonomi dengan orientasi peluang kerja.

Menurut Dawam Rahardjo (1986), ada beberapa alasan mengapa sektor pertanian perlu dibangun terlebih dahulu. *Pertama*, hasil in-

dustri memerlukan dukungan daya beli masyarakat, sementara sebagian besar calon pembeli potensial tersebut berada di pedesaan. Karena itu pembangunan pertanian mutlak diperlukan. *Kedua*, usaha untuk memperkecil biaya gaji, sehingga upah dan gaji yang diterima dapat memenuhi kebutuhan pokok buruh dan pegawai. Hal ini dapat dicapai apabila produksi pertanian terutama pangan dapat ditingkatkan. *Ketiga*, industri memerlukan sumber bahan baku dari pertanian dan merupakan basis bagi perkembangan industri tersebut.

Dalam perspektif pembangunan pertanian yang lebih luas, pembangunan pertanian perlu mendapatkan prioritas sekalipun pilihan telah dijatuhkan pada industrialisasi. Pandangan ini berdasarkan keyakinan bahwa sektor pertanian mempunyai kelebihan kelebihan untuk menghasilkan surplus. Ini hanya mungkin terjadi jika produktivitas petani ditingkatkan sehingga meningkatkan pendapatan mereka dan kemampuan untuk mengakumulasi modal. Selanjutnya, jika penggunaan teknologi pertanian dapat meningkatkan produktivitas petani, maka kelebihan beban tenaga kerja dapat digeser ke sektor industri. Jadi sektor pertanian merupakan sumber tenaga kerja. Selain itu, juga dapat diduga sebelumnya kalau akan terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan kecenderungan berkurangnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB.

Namun sayangnya, pembangunan pertanian dan pedesaan mengandung dilema. Disatu sisi produksi dan produktivitas di sektor pertanian harus ditingkatkan, karena merupakan landasan dan prasyarat bagi proses industrilisasi, namun perubahan struktur produksi yang menurunkan tingkat produktivitas struktur produksi yang menurunkan tingkat produktivitas relatif tidak akan terhindar jika tidak diikuti oleh perubahan struktur kesempatan kerja. Sementara itu peningkatan produktivitas memerlukan pilihan teknologi yang lebih efisien, dan ini akan menghemat penggunaan tenaga kerja yang pada

## **Perkembangan sektor non farm sebagai alternatif penciptaan peluang kerja di pedesaan juga berkaitan dengan startegi pembangunan, otomatis pendekatan dualisme juga mewarnainya.**

gilirannya menimbulkan proses marginalisasi di pedesaan (**Dawam Rahardjo, 1986;21**).

Disinilah peranan peluang kerja diluar ataupun bukan sektor pertanian amat diperlukan. Berkembangnya peluang kerja baik disektor sekunder maupun tersier di pedesaan dapat merupakan alternatif bagi kelebihan tenaga kerja pertanian. Masalahnya sekarang, nampaknya pemahaman tentang keberadaan maupun keterkaitan sektor ini dengan sektor pertanian masih kurang mendapatkan perhatian. Hal ini di dukung oleh kesulitan untuk membuat batasan-batasan teoritis maupun praktis terutama disektor non farm sebagai akibat dualisme dalam struktur pekerjaan di pedesaan.

### **Fenomena Non Farm**

Bagian ini akan menguraikan beberapa pendekatan dan pandangan teoritis yang lazim digunakan untuk menyoroti keberadaan sektor non farm, dari sudut pandangan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang prospeknya di masa mendatang.

Para ahli ilmu sosial termasuk ekonomi biasanya menggunakan paradigma dualisme dalam melihat struktur sosial ekonomi masyarakat di negara-negara berkembang, misalnya **Boeke (1953)** dengan konsep masyarakat kapitalis dan prakapitalis atau modern dengan tradisional, juga **Geertz (1963)** dengan konsep Bazaar economy dan firm centered economy (lihat **Hidayat, 1983**). Walaupun banyak mendapat kritik dan memiliki berbagai kelemahan, nyatanya sampai sekarang teori ini masih mengilhami sejumlah pembuatan kebijakan pembangunan.

Perkembangan sektor non farm sebagai alternatif penciptaan peluang kerja di pedesaan juga berkaitan dengan startegi pembangunan,

otomatis pendekatan dualisme juga mewarnainya. Menurut **Effendi (1990)** setidaknya ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat keterkaitan tersebut. Pertama, pendekatan miderennisasi yang intinya menekankan keterbelakangan ekonomi dan sifat tradisional di kawasan pedesaan, atau menurut istilah **Dawam Rahardjo (1986)** adanya hambatan institusional yang sulit dirubah menyebabkan munculnya masalah tenaga kerja di pedesaan. Karena itu industri diharapkan dapat berperan banyak untuk menjawab masalah ketenagakerjaan tersebut. Pendekatan ini melahirkan banyak sentara-sentra industri (*center of growth*), terlebih di negara-negara berkembang industri yang dikembangkan adalah industri substitusi import yang padat modal, sedikit sekali keterkaitannya dengan sektor pertanian. Hasilnya terlihat berupa pertumbuhan kota-kota besar dan berkembangnya sektor sekunder dan tersier. Namun kelemahan pokoknya adalah pemerataan hasil pembangunan tidak tercipta, ditambah lagi dengan masalah kemiskinan dan pengangguran (urban bias).

*Kedua*, pendekatan ekonomi politik, muncul sebagai reaksi atas kegagalan strategi pembangunan yang pertama. Kolonialisme, invasi teknologi, penetrasi ekonomi kapitalis di pedesaan dituding sebagai penyebab utama masalah keterbelakangan dan ketenagakerjaan di pedesaan ini. Bahkan dinegara-negara sosialis sekalipun tempat strategi ini dianut terjadi pemuatan modal dan kekuasaan pada sekelompok kecil elit pemeritahan.

Pendekatan yang ketiga, pada keterkaitan antara sektor pertanian dan non pertanian dalam suatu perekonomian. Nampaknya pendekatan ini berkaitan dengan strategi pertumbuhan dan pemerataan yang telah disebutkan sebelumnya.

**Mellor (1976)** merupakan ahli yang pertama kali mencari keterkaitannya dengan sektor pertanian. Ciri khas adalah, bahwa strategi ini meletakkan sektor pertanian sebagai dasar dalam pengembangan ekonomi dan peluang kerja di pedesaan. Sektor pertanian dipandang dapat berperan penting dalam penciptaan peluang kerja bukan pertanian (non farm), Mellor mengemukakan dua cara. *Pertama*, melalui peningkatan produksi dengan penerapan teknologi baru terutama produksi bahan pangan. *Kedua*, melalui diversifikasi pertanian yang diharapkan yang diharapkan mampu meningkatkan penghasilan petani.

Moderenisasi pertanian sangat diyakini sebagai suatu cara untuk meningkatkan produksi pangan dan merangsang pertumbuhan peluang kerja akibat meningkatnya pendapatan petani kaya. Perubahan pola konsumsi petani kaya ini pada gilirannya akan merangsang pertumbuhan industri dan pelayanan kebutuhan rumah tangga. Justru disinilah letak kelemahan teori Mellor, karena pola konsumsi masyarakat sangat sulit diduga apalagi diarahkan. Masalahnya apabila petani tersebut tergolong kaya, maka konsumsinya akan berubah dengan mengkonsumsi hasil produksi di sektor moderen yang umumnya berada di kota. Disamping itu, Faisal Kasryno (1984), menyebutkan bahwa penggunaan teknologi mekanis, yang dapat menekan biaya produksi dan penggunaan tenaga kerja keluarga mengakibatkan makin timpangnya distribusi pendapatan. Hal ini hanya dapat diperbaiki dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh sektor luar pertanian, disertai dengan tingkat upah yang lebih tinggi dari sektor pertanian.

**Manning (1988)** dalam **Effendi at.all (1990)** juga berpandangan sama, bahwa revolusi hijau telah mampu meningkatkan penghasilan penduduk pedesaan. Namun dampaknya terhadap peluang kerja bukan pertanian masih terbatas. Papola (1987) juga termasuk diantara mereka yang menolak aspek positif

dari moderenisasi. Menurutnya peningkatan produksi dan penghasilan petani tidak mempunyai dampak positif pada peningkatan industri pedesaan. Kecenderungan pemusatan pada satu jenis tanaman sama sekali tidak merangsang pertumbuhan industri.

Penolakan terhadap model moderenisasi yang dikembangkan sebenarnya tidak sepenuhnya, karena umumnya mereka menyetujui moderenisasi sekaligus usaha diversifikasi pertanian, tetapi bagaimana proses moderenisasi pertanian itulah yang selalu dipertanyakan. Buktinya, masih banyak yang mengakui bahwa transformasi pertanian, dan komersialisasi pertanian akan mengakibatkan semakin meningkatnya pendapatan petani. **Oshima (1971)** mencatat bahwa semenjak tahun 1970-an, unit produksi di pedesaan Asia memperlihatkan kemajuan yang menakjubkan, baik dari sisi tenaga kerja maupun dari segi nilai tambah produksi. Hal ini tidak hanya menutup kemungkinan-kemungkinan terjadinya industri pedesaan yang berskala kecil. Terjadinya kenaikan pendapatan daya beli terhadap barang-barang non-pertanian. Hal ini menyebabkan timbulnya industri kecil yang justru membuka peluang kerja yang cukup tinggi. Misalnya pada tahun 1966 penyerapan tenaga kerja disektor industri pedesaan sudah mencapai 43 persen di Korea Selatan, sedang Thailand angka tersebut sudah mencapai 70 persen (Elfindri dan Yusrizal Yulius, 1991).

Samapai saat ini, nampaknya teori yang menekankan keterkaitan antar sektor pertanian dan non pertanian, justru paling relevan dan banyak dianut. Moderenisasi dan mekanisme disektor pertanian mutlak perlu dilakukan dalam usaha meningkatkan pendapat masyarakat pedesaan. Hanya saja bagaimana dan seberapa intensitas moderenisasi pertanian yang dilakukan itulah yang perlu terus dikaji ulang. Pemakaian teknologi dan pemupukan modal yang dilakukan hendaknya disesuaikan dengan kondisi, kultur sosial dan ekonomi yang sangat menentukan

kemampuan adaptasi dan absorpsi masyarakat desa terhadap modernisasi pertanian, minimal ada kesempatan untuk melakukan pilihan terhadap alternatif teknologi yang dikembangkan. Disini peranan mekanisme pasar, dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah diperlukan, artinya tanaman apa yang harus ditanam, teknologi apa yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat petani yang bersangkutan.

Dari sudut pandang ekonomi, kebebasan untuk melakukan pemeliharaan dalam menggunakan dan memanfaatkan asset-asset ekonomi adalah faktor yang sangat penting dalam usaha maksimisasi pendapatan. Lee (1965) misalnya menerangkan bagaimana kemampuan petani dalam mengalokasikan waktu kerja yang dimilikinya dengan alternatif pilihan hanya di sektor pertanian saja atau menambah jam kerjanya diluar sektor pertanian dengan mengurangi saat leisure akan dapat mengoptimalkan tingkat pendapatannya. Selanjutnya Lee juga menerangkan bagaimana kemampuan mengkombinasikan antara bekerja di sektor Farm dan non farm akan menghasilkan kepuasan optimal bagi para petani dalam bentuk peningkatan pendapatan.

Satu hal yang juga penting untuk dikemukakan adalah bahwa usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan diversifikasi pertanian perlu terus dilakukan. Setidaknya sampai saat ini diversifikasi pertanian telah banyak terbukti mampu meningkatkan peluang kerja di pedesaan. Berkembangnya usaha agribisnis, agro industri, industri kerajinan, industri bahan-bahan pangan akan menciptakan efek sampingan berupa tumbuhnya usaha-usaha jasa sebagai keterkaitan dan membentuk mata rantai yang meluas akan merupakan alternatif peluang kerja bagi masyarakat desa, terutama mereka yang tidak memiliki lahan atau petani dengan lahan sempit.

Stetanant (1985,92) dalam Effendi (1990), menunjukkan hasil penelitian di Thailand telah

menemukan bahwa tingkat kegiatan non farm pedesaan berhubungan langsung dengan kenaikan aktivitas sektor pertanian. Witz (1971,17) juga berpendapat sama. Menurutnya diversifikasi pertanian mempunyai kekuatan untuk memecahkan masalah pengangguran terselubung di pedesaan karena dapat menampung pekerjaan sepanjang tahun.

### Kesimpulan

Terdapatnya kecendrungan semakin menyempitnya lahan pertanian, laju pertumbuhan penduduk pedesaan telah menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran di pedesaan terutama tingkat setengah pengangguran. Sementara itu, strategi pembangunan yang diterapkan di sektor pertanian nampaknya belum mampu memberikan alternatif bagi tumbuhnya peluang kerja baru di sektor non pertanian.

Karena itu, strategi pembangunan pertanian (pedesaan) yang memperhatikan keterkaitan antara sektor pertanian dan non pertanian dengan sasaran penciptaan peluang kerja baru di sektor bukan pertanian (*non farm employment*) sebagaimana dikemukakan Mellor (1976) sangat penting untuk terus dikembangkan.

Keseluruhan pandangan teoritis yang disajikan dalam tulisan ini, mencoba untuk memberikan dukugan bahwa usaha untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan hanya dapat dilakukan apabila tercipta alternatif peluang kerja yang lebih besar di sektor non pertanian. Dalam kaitan ini, maka prospek sektor non farm yang dapat dikembangkan melalui usaha modernisasi dan diversifikasi pertanian sangat membantu pemecahan masalah ketenagakerjaan di pedesaan pada masa yang akan datang. Namun yang harus selalu dipertimbangkan adalah penerangan strategi tersebut sedapat mungkin harus disertai pengurangan distorsi dalam kebijakan pembangunan pedesaan dengan lebih banyak memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomiannya.

**Daftar Pustaka**

- Elfindri dan Yuzril Yunus**, *Penyerapan Tenaga Kerja di Pedesaan Sumatera Barat (Pilihan Antara off Farm dan Non Farm)*, Warta Demografi, Tahun XXI/No.1 Pebruari, 1991.
- Effendy, Tadjuddin Noer at.all**, *Kegiatan Non Farm di Pedesaan, Studi Kasus di Jatinom*, PPK UGM, 1990.
- Kasryno, Faisal**, *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Kantor Menteri Negara KLH dan PPK UGM**, *Analisa Data Sekunder, Kesempatan Kerja di Luar Sektor Pertanian*, Yogyakarta, PPK UGM, 1990
- Lee Jr, Jhon E**, *Allocation Farm resources Between Farm and non Farm Uses*, Journal Farm Economics, Februari, 1965.
- Rahardjo, Dawam M**, *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*, UI Press, 1986.
- White Benjamin**, *Rural non-Farm Employment in Java: Recent Development, Policy Issues and Research Needs*, Report Prepared in the Framework of the UNDP/ILO Departmen of Manpower Project INS/84/006, Implementation of an Employment Creation Strategiy, January, 1986.